

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan bentuk organisasi non laba yang memiliki orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang keamanan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Berbeda dengan organisasi lainnya, organisasi pemerintah mempunyai ciri khas tersendiri yang lebih terlihat sebagai organisasi politik daripada organisasi ekonomi. Namun, seperti halnya bentuk-bentuk organisasi lain, organisasi pemerintah tentunya tetap memiliki aspek perwujudan Lembaga ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah diharuskan melakukan berbagai bentuk pengeluaran dalam rangka membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sesuai ketentuan dalam APBD. Namun, di sisi lain, pemerintah diharuskan untuk dapat pula melakukan berbagai macam cara untuk memperoleh penghasilan dengan tujuan untuk dapat mengatasi seluruh biaya tersebut.

Anggaran pada organisasi pemerintah adalah salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan. Sangat dibutuhkan perencanaan yang matang sebelum merealisasikan suatu program atau kegiatan, agar tujuan dari program kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik. Salah satunya adalah anggaran. Anggaran menjadi sarana untuk mencapai tujuan atau harapan yang telah ditentukan sesuai periode tertentu baik di lingkungan pemerintah maupun sektor publik.

Pada sektor publik, anggaran yang disusun terlihat menjadi suatu hal yang rumit. Pada sektor swasta, anggaran disusun dan ditetapkan dengan tujuan utamanya adalah mengutamakan laba atau keuntungan, serta anggaran yang disusun penuh dengan kerahasiaan. Hal ini berbeda dengan anggaran sektor publik, anggaran yang ada harus dapat tersampaikan kepada publik melalui informasi Keterbukaan publik sehingga publik dapat melakukan evaluasi dan dapat menjadi perbaikan untuk periode mendatang. Adanya keterbukaan informasi anggaran ini menjadikan pemerintah perlu untuk melaksanakan reformasi terkait administrasi publik, yang pada akhirnya berpengaruh pada sistem penganggaran. "Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah” (Muindro Renyowijoyo 2012:54).

Ketersediaan anggaran tentunya mempunyai peranan penting sebagai sarana menjaga stabilitas, penyediaan sumber daya masyarakat, distribusi, persiapan serta penyeimbang lembaga maupun dalam hal peningkatan kemampuan. Hal ini menjadikan laporan realisasi anggaran sebagai suatu bentuk dokumen pelaksanaan realisasi keuangan pemerintah daerah. Analisis laporan realisasi anggaran dengan menggunakan rasio efektif dan rasio efisien pada kantor badan perijinan terpadu dan penanaman modal kabupaten serang (Rukayah, 2017) dan analisis penyusunan anggaran berbasis kinerja kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai gersik (Elly Hersrini, 2015).

Aspek perencanaan yang baik dalam penyusunan APBD yang disusun semaksimal mungkin, dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan guna menetapkan arah kebijakan umum, skala prioritas dan menetapkan alokasi serta distribusi sumber daya yang tentu saja perlu mengikutsertakan partisipasi masyarakat yang pada akhirnya dapat tersusun anggaran yang ekonomis, efektif dan efisien. Dalam hal penggunaan belanja daerah harus dilaksanakan sesuai output dan masukan yang jelas mengikuti prioritas pembangunan, sehingga pelaksanaan anggaran yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan kepada publik.

Di bawah ini disajikan data realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kota Metro.

Tabel 1. Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran
2018	969.783.841.067,68	868.248.180.371,74
2019	986.352.682.934,74	902.508.611.826,02
2020	1.009.042.915.071,71	946.165.570.428,71

(BPKAD Kota Metro, 2018 s.d 2020)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan Pemerintah Daerah Kota Metro pada tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan. Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Kota Metro dikarenakan Pemerintah Kota Metro adalah salah satu pemerintah daerah yang telah melaksanakan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah telah

diberikan kewenangan dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangannya sendiri dan untuk mengetahui apakah Pemerintah Kota Metro telah melaksanakan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Hal inilah yang menjadikan peneliti termotivasi untuk dilakukannya penelitian pada Pemerintah Kota Metro. Berdasarkan adanya penelitian terdahulu pula yang telah membahas masalah serupa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisi Efektivitas dan efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2018 – 2020”.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian yang sebagaimana telah dibahas dalam uraian latar belakang, maka penulis mengajukan rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kota Metro”?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Agar dapat diketahui tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kota Metro dalam melaksanakan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Agar dapat diketahui tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Kota Metro dalam melaksanakan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi bacaan atau referensi yang dapat memberikan wawasan ilmiah, dan memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak yang melakukan penelitian terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Peneliti di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, akan mendapatkan manfaat berupa wawasan tambahan dan kemampuan untuk membandingkan teori yang diperoleh dari studi kuliah dengan kenyataan sebenarnya.

b. Bagi pemerintah daerah

Selain sebagai bahan masukan dan acuan dalam proses evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah serta pilihan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan otonomi daerah.

c. Bagi masyarakat

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum mengenai kinerja keuangan serta tingkat realisasi pendapatan dan belanja daerah khususnya APBD Pemerintah Kota Metro.